

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Kesatuan sistem informasi akuntansi yang melalui proses pengklasifikasian, pencatatan, pengikhtisaran akan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah disusun mencerminkan keadaan suatu perusahaan. Para ahli mendefinisikan pengertian laporan keuangan sebagai berikut:

Pendapat Hans Kartikahadi, dkk. (2016:12) Laporan Keuangan adalah : “Media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan seperti :

pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, badan pemerintahan, manajemen”. Disisi lain, menurut para ahli laporan keuangan mengandung definisi yaitu : laporan yang menyajikan informasi keuangan dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen.

Tujuan laporan keuangan menurut SAK EMKM (2018:3) adalah sebagai berikut:

“Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut”.

Laporan keuangan dalam SAK EMKM hanya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.

a. Laporan Posisi Keuangan EMKM

Pada laporan posisi keuangan EMKM terdiri dari aset, liabilitas dan ekuitas. Aset yang tercatat juga terdiri dari aset berwujud dan tidak berwujud. Liabilitas merupakan kewajiban yang dimiliki entitas baik yang memiliki karakter sebagai kewajiban hukum maupun kewajiban konstruktif. Kewajiban hukum contohnya adalah hutang pajak, dan kewajiban konstruktif salah satunya ialah penyerahan aset selain kas. Ekuitas sendiri merupakan klaim terhadap entitas yang tidak termasuk dalam liabilitas

b. Laporan Laba Rugi

Dalam laporan laba rugi menurut SAK EMKM sama dengan SAK lainnya yakni meliputi penghasilan dan beban. Dari pengurangan antara penghasilan dan beban inilah diketahui jumlah laba yang dihasilkan oleh suatu entitas.

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam catatan laporan keuangan menurut SAK EMKM terdiri dari ikhtisar kebijakan akuntansi, pernyataan tentang penyusunan laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAK EMKM dan informasi tambahan tentang transaksi penting dan UMKM dapat dikategorikan menjadi tiga terutama berdasar jumlah aset dan omzet sebagaimana tercantum di Undang– Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:

- 1 Usaha Mikro : Usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi criteria sebagai berikut :
 - $Aset \leq Rp50.000.000,00$, Memiliki kekayaan bersih kurang dari atau sama dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - $Omzet \leq Rp300.000.000,00$, Memiliki hasil penjualan tahunan kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 2 Usaha Kecil : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - $Rp50.000.000,00 < Aset \leq Rp500.000.000,00$, Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau $Rp300.000.000,00 < Omzet \leq 2.500.000.000,00$, Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3 Usaha Menengah: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - $Rp500.000.000,00 < Aset \leq Rp10.000.000.000,00$, Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- Rp2.500.000.000,00 < Omzet ≤ Rp50.000.000.000,00, Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil & Menengah (SAK EMKM) Standart akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah (SAK EMKM) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro kecil dan menengah. Entitas mikro kecil dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut.

2.1.2 Manfaat Dan Tujuan

SAK EMKM dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan memiliki prinsip *going concern* yakni menginginkan usahanya terus berkembang. Untuk mengembangkan usaha perlu banyak upaya yang harus dilakukan. Salah satu upaya itu adalah perlunya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam akuntansi wujud pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar, akan membantu manajemen perusahaan untuk memperoleh berbagai kemudahan, misalnya: untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang datang, dapat memperoleh pinjaman dana dari pihak ketiga, dan sebagainya.

Standar EMKM ini disusun cukup sederhana sehingga tidak akan menyulitkan bagi penggunaanya yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas public (EMKM) yang mayoritas adalah perusahaan yang tergolong usaha kecil dan menengah.

EMKM sebagaimana kepanjangan yang telah diuraikan di atas merupakan unit kegiatan yang melakukan aktifitas tetapi sahamnya tidak dimiliki oleh masyarakat atau dengan kata lain unit usaha yang dimiliki oleh orang perorang atau sekelompok orang, dimana kegiatan dan modalnya masih terbatas. Jenis kegiatan seperti ini di Indonesia

menempati angka sekitar 80 %. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus dari semua pihak yang berkepentingan dalam hal penyajian laporan keuangan.

2.1.3 Karakteristik SAK EMKM

Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan menurut SAK EMKM yang tercantum dalam Bab ke 2 Adalah sebagai berikut:

- a. Standar akuntansi yang berdiri sendiri *atau Stand alone accounting standard* (tidak mengacu ke SAK Umum).
- b. Mayoritas menggunakan *historical cost concepts*.
- c. Hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan Usaha Kecil dan Menengah.
- d. Pengaturan lebih sederhana dibandingkan SAK Umum, dalam penyusunan laporan keuangan ada beberapa karakteristik dari segi kualitatif yaitu:

a. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material

dari SAK EMKM agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

d. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

e. Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

f. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi tidak pasti, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan asset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengijinkan bias.

g. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

h. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu,

pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengijinkan bias.

i. Tepat Waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relative antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

j. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal. SAK EMKM (2016)

2.1.4 Pengukuran Unsur-unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan.

Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar:

a. Biaya historis.

Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.

b. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. SAK EMKM (IAI, 2016:7)

2.1.5 Penggunaan SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, investor saham, dll Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:
 - a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
 - b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. SAK EMKM (2016) Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK EMKM jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK EMKM.

2.1.6 Implementasi SAK EMKM

SAK EMKM mulai diberlakukan pada tahun 2016. Penggunaan PSAK ini harus konsisten untuk tahun-tahun berikutnya. Apalagi yang sudah memutuskan untuk menggunakan PSAK umum dalam penyajian laporan keuangan, maka untuk selanjutnya tidak boleh merevisi kebijakannya ke PSAK EMKM.

Entitas dapat menerapkan SAK EMKM secara retrospektif, namun jika tidak praktis, maka entitas diperkenankan untuk menerapkan SAK EMKM secara prospektif. Entitas

yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah menyusun laporan keuangan maka:

- a. Mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan dalam SAK EMKM;
- b. Tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK EMKM tidak mengijinkan pengakuan tersebut;
- c. Mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, kewajiban atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK ETAP;
- d. Menerapkan SAK EMKM dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang diakui.

Penerapan secara retrospektif artinya bahwa kebijakan akuntansi yang baru diterapkan seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah digunakan sebelumnya. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang baru, diterapkan pada kejadian atau transaksi sejak tanggal terjadinya kejadian atau transaksi tersebut. Sedangkan penerapan secara prospektif artinya kebijakan akuntansi yang baru, diterapkan pada kejadian atau transaksi yang terjadi setelah tanggal perubahan. Tidak ada penyesuaian yang dilakukan terhadap periode sebelumnya.

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada saldo awal neracanya berdasarkan SAK EMKM mungkin berbeda dari yang digunakan untuk tanggal yang sama dengan menggunakan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya. Hasil penyesuaian yang muncul dari transaksi, kejadian atau kondisi lainnya sebelum tanggal efektif SAK EMKM diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal penerapan SAK EMKM.

Pada tahun awal penerapan SAK EMKM, entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK EMKM dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK EMKM, tetapi berdasarkan PSAK non-EMKM sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK EMKM ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya. Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK EMKM, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Entitas

tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non- EMKM dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK EMKM ini kembali.

Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-EMKM dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK EMKM, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK EMKM ini dalam menyusun laporan keuangan.

2.1.7 Penyajian Laporan Keuangan

1. Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban Penerapan SAK EMKM, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan

laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

2. Kepatuhan Terhadap SAK EMKM

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK EMKM harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK EMKM kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK EMKM.

3. Kelangsungan Usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK EMKM membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material

terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha.

4. Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan:

- a. Fakta tersebut
- b. Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek
- c. Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan

5. Penyajian Yang Konsisten

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:

- a. Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan
- b. Kebijakan akuntansi atau
- c. SAK EMKM mensyaratkan suatu perubahan penyajian.

Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi:

- a. Sifat reklasifikasi;
- b. Jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi
- c. Alasan reklasifikasi. Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan:
 - a. Alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan; dan

b. Sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasi.

6. Informasi Komparatif

harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK EMKM (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

7. Materialitas Dan Agregasi

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

8. Laporan Keuangan Lengkap

Laporan keuangan entitas meliputi:

- a. Neraca;
- b. Laporan laba rugi;
- c. Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
 - Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
 - Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
- d. Laporan arus kas; dan
- e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

9. Identifikasi Laporan Keuangan

Entitas harus mengidentifikasikan secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi

lain dalam laporan tersebut. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan:

- a. Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode terakhir;
- b. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;
- c. Mata uang pelaporan,
- d. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan Entitas harus mengungkapkan hal berikut ini dalam catatan atas laporan keuangan:
 - a. Domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantornya yang terdaftar;
 - b. Penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya.

2.1.8 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak sektor UMKM sangat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. UMKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar.

UU No. 20 tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil dan menengah, terdapat beberapa definisi yang dapat mengklasifikasikan suatu entitas ke dalam jenis usaha kecil atau menengah yaitu:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Selain itu, UMKM juga memiliki beberapa kriteria yaitu:

- a) Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Definisi UMKM yang pertama adalah tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. Kedua, rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembebanan usahanya dari modal sendiri atau sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum memiliki status badan hukum.

Dari pernyataan mengenai definisi UMKM diatas maka secara garis besar dapat ditarik satu benang merah yang serupa mengenai UMKM. Pertama, jika dilihat dari sisi kekayaan, UMKM cenderung merupakan suatu entitas yang memiliki kekayaan bersih tidak kurang dari Rp.10 Milyar. Kedua, UMKM merupakan suatu unit bisnis yang permodalannya juga lebih banyak mengandalkan dari struktur modal pribadi atau pada tingkatan yang lebih maju telah menggunakan bantuan yang berasal dari kredit usaha kecil. Ketiga, pada umumnya UMKM belum memiliki status badan hukum. Keempat, golongan industri UMKM masih terbatas pada golongan usaha yang cenderung sederhana.

2.1.9 Hambatan UMKM

1. Secara umum UMKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan masalah nonfinansial (organisasi manajemen). Masalah yang termasuk dalam masalah finansial di antaranya adalah Sulitnya memperoleh akses kredit atau modal. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM.
2. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil.
3. Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
4. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.
5. Banyak UMKM yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial. Sedangkan yang termasuk dalam masalah organisasi manajemen (nonfinansial) di antaranya adalah :

- 1) Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *quality control* yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
- 2) Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk/ jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
- 3) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) secara kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM.
4. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi.

2.1.10 Laporan Keuangan UMKM

Penyajian terhadap laporan keuangan UMKM telah disusun secara rinci pada SAK EMKM. Oleh karena itu, (Rusastra, 2018) menjelaskan penyusunan secara rinci tersebut ialah penyajian yang harus memenuhi : a. Kriteria komparatif yang dapat terpenuhi apabila suatu laporan keuangan menyajikan minimum dua periode untuk tiap unsur laporan keuangan.

Kriteria konsisten yang dapat terpenuhi apabila dari periode ke periode laporan keuangan tersebut disusun, dan disajikan dengan standar pelaporan yang sama secara kontinyu, kecuali terjadi perubahan yang signifikan atas entitas atau standar yang berlaku. Adapun (Rusastra, 2018) juga menjelaskan, bahwa laporan keuangan dapat dikatakan

lengkap menurut standar EMKM, apabila :

- a. Laporan keuangan tersebut minimal terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode.
- b. Laporan laba rugi selama periode.
- c. Catatan atas laporan keuangan yang memuat tambahan, serta rincian akun-akun tertentu yang memiliki relevansi

2.1.11 Unsur Laporan Keuangan UMKM

Menurut SAK EMKM (2018) unsur laporan keuangan UMKM terdiri dari:

a. Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu darimana manfaat ekonomi dimasa depan akan diharapkan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Weygandt 2007,255:Harta (Aset) adalah keuntungan ekonomi masa depan yang diperoleh untuk dikendalikan oleh kesatuan tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu.

b. Kewajiban

Karakteristik esensial dari kewajiban (*liabilities*) adalah bahwa entitas mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban secara hukum dan kewajiban konstruktif. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Suatu kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari suatu tindakan entitas:

- 1) Dengan suatu praktik masa lalu, kebijakan yang dikeluarkan atau suatu Standar kini yang cukup spesifik, entitas telah mengindikasikan kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu; dan
- 2) Sebagai konsekuensi, entitas telah menciptakan suatu harapan yang valid kepada pihak lain bahwa pihak lain akan melepas tanggung jawab tertentu. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya. dengan pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban

tersebut dengan kewajiban lain atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur melepaskan atau mengorbankan haknya.

c. Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas normal entitas dan mengacu pada beberapa istilah seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa.

d. Beban

Definisi beban adalah beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas normal entitas meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan dan aset tetap.

e. Ekuitas

Ekuitas adalah hak sisa pada aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Ekuitas meliputi investasi pemilik entitas, ditambah dengan hasil atas investasi yang diperoleh melalui operasi yang menguntungkan dan hasil yang ditahan kembali untuk digunakan dalam operasi entitas tersebut, dikurangi dengan penurunan atas investasi pemilik sebagai akibat dari operasi yang tidak menguntungkan dan alokasi kepada pemilik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Menurut Nurlaila(2018) dengan judul “Penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM)pada sukma cipta ceramic dinoyo malang”, yang mengatakan bahwa UMKM sukma cipta ceramic yang ada di malang belum bisa menerapkan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber daya manusia yang paham akan laporan keuangan belum memadai begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh supriyanti (2017) dengan judul, Model perancangan laporan keuangan UMKM berbasis SAK EMKM pada budidaya perikanan kota majalaya yang mengemukakan hasil penelitian yang tidak beda jauh dari penelitian Nurlaila dimana UMKM yang di telitinya pun belum melaksanakan pencatatan sesuai dengan SAK EMKM.begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh ayu marsa devany(2017) , Ni komang isma dewi(2017),djuwito(2017), Ketut ari warsadi(2017), dan Fransiskus damien(2017) yang hasil penelitiannya tidak beda jauh bahwa para pelaku UMKM yang mereka teliti blm menerapkan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM.Lain halnya dengan

penelitian yang dilakukan oleh Bellamita padamandari(2017) yang mengatakan bahwa dari beberapa UMKM yang iya teliti ada beberapa yang siapa untuk menggunakan SAK EMKM pada laporan keuangannya meskipun hanya ada beberapa diantara berapa informan yang iya wawancarai tetspi setidsknya ada pihak UMKM yang ingin berubah .Begitupun juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari nurul fatimah(2017) yang mengemukakan hasil penelitian yang tidak beda jauh dari hasil penelitian Bellamita padamandari.

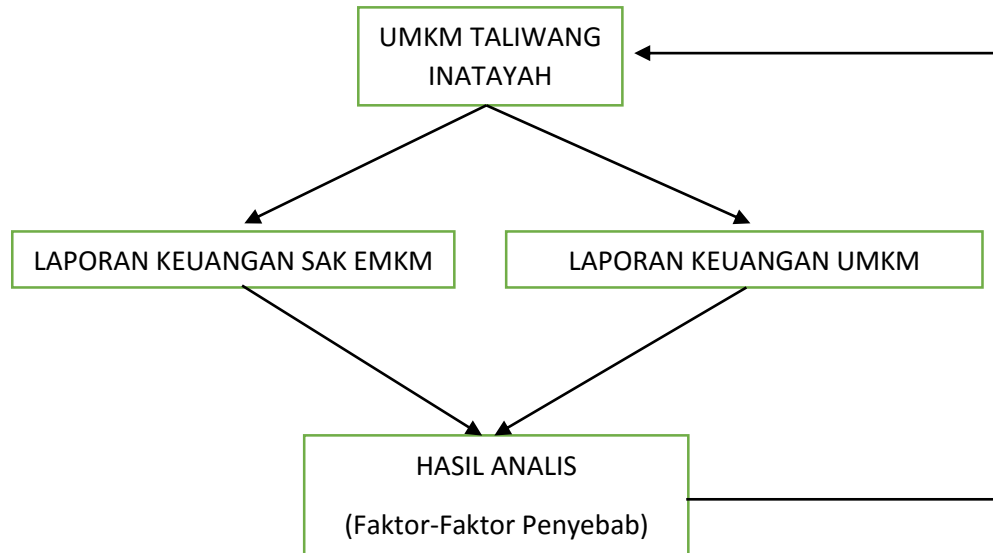
Tabel 2.2 penelitian terdahulu

NO	NAMA/TAHUN	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Nurlaila, 2018. e-jurnal, universitas islam negri maulana malik ibrahim .	Penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM)pada sukma cipta ceramic dinoyo malang	Kualitatif	Sukma cipta cramic belum menerapkan SAK EMKM karena belum memahami SAK EMKM serta keterbatasan waktu dan sumber daya manusia serta belum ada tenaga akuntansi yang profesional pada sukma cipta cramic
2	Ari nurul fatimah,2017 e- jurnal, universitas gaja mada.	Analisis penerapan lima Usaha kecil dalam implementasi SAK EMKM di kabupaten purworejo	Kualitatif	pada usahanya. Dari kelima usaha tersebut hanya ada dua yang siap untuk menerapkan SAK EMKM pada usahanya dan tiga lainnya belum siap menerapkan SAK EMKM.
3	Supriyanti, 2017 e- jurnal, universitas komputer indonesia	Model perancangan laporan keuangan UMKM berbasis SAK EMKM pada budidaya perikanan kota majalaya	Kualitatif	Pelaku budidaya pembesaran perikanan ini tidak memiliki pencatatan akuntansi yang belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
4	Ayu marsa devany,2017 Jurnal ilmiah, universitas brawijaya vol.6 No:1 Analisis kebermanfaatan	Analisis kebermanfaatan sistem informasi akuntansi yang dapat menghasilkan laporan	Kualitatif	SIA yang menghasilkan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM untuk UMKM ARA belum di perlukan.

	sistem informasi.	keuangan berdasarkan akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM) pada UMKM dengan omzet kecil(studi kasus pada UMKM ARA.		
--	-------------------	---	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran.

Kerangka pemikiran peneliti:



Gambar 1 : Kerangka pemikiran (Penulis 2022)

